

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad Subianto, 2010, *Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Gibon Books, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Asih Eka Putri dan A.A. Oka Mahendra, 2013, *Pengantar Hukum-Jaminan Sosial: Transformasi Setengah Hati Persero*, Pustaka Martabat, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, 2006, *Mimpi negara kesejahteraan: Peran Negara dalam Produksi dan Alokasi Kesejahteraan Sosial*, LP3ES, Jakarta.
- Handari Nawari, 1998, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hotbonar Sinaga, 2009, *Membangun Jaminan Sosial Menuju Negara Kesejahteraan*, CV Java Madia Network, Jakarta.
- Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- John D. Stephens, 2001, *Development and Crisis of the Welfare State: Parties and Policies in Global Market*, University of Chicago Press, USA.
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon dkk., 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Negara.*, Cetakan kesembilan., Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Prajudi Atmosudirjo, 1988, *Hukum Administrasi Negara*, Ghlmia Indonesia , Jakarta.
- Reksodipuro, Mardjono, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* , Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rony Hanityo Soemitro, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghlmia Indah, Jakarta.

- SF. Marbun. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, 1997, Lyberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- W. Riawan Tjandra, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atma Jaya: Yogyakarta.
- Raharjo, Satjipto, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- Raharjo, Sajipto. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Alumni. Bandung.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Winarno Surachman, 1990, *Pengantar Metodologi Research*, CV Tarsito, Bandung.
- Widodo Suryandono, 2011, *Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, BPHN Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta.
- Yaumil Ch. Agoes Achir, 2002, "Jaminan Sosial Nasional Indonesia", Jurnal Ekonomi Rakyat, Tahun ke 1.

Tesis dan Skripsi

- Paulus Sanjaya, 2017, Penegakan Hukum Atas Ketentuan Pendaftaran Peserta BPJS Menurut Undang-Undang 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Studi Kasus BPJS Ketenagakerjaan Di Wilayah Hukum DKI Jakarta), *Tesis*, Falkutas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Retno Utami, 2015, Pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan Pada Perusahaan-Perusahaan Swasta Di Wilayah Kabupaten Sleman, *Skripsi*, Falkutas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Jurnal

Yaumil Ch. Agoes Achir, “Jaminan Sosial Nasional Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Rakyat*, Tahun ke 1, Nomor 7, September 2002.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14). (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50). (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116). (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29). (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481).

Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238). (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874).

Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraam Jaminan Kesehatan.

Internet:

<http://umkm.jogjakota.go.id/direktori2/group.php?mod=klas>, UMKM Kota

Yogyakarta, oleh Dinas Perindagkoptan Kota Yogyakarta

<https://k3dYogyakarta.wordpress.com/2014/01/04/1-500-pemberi-kerja-belum-mendaftar-bpjs-kesehatan/>. 1.500 Pemberi kerja Belum Mendaftar Bpjs Kesehatan. Oleh Wordpress

<http://www.harianjogja.com/baca/2016/01/25/bpjs-kesehatan-belum-semua-badan-usaha-daftarkan-pekerja-684470>, Masih banyak pemberi kerja yang belum sepenuhnya mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan. Oleh Bernadheta Dian Saraswati

http://www.who.int/health_financing/universal_coverage_definition/en/ dengan judul Developing a national health financing strategy: a reference guide oleh World Health Organization.

http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1663, Law Enforcement: Harapan dan Tantangan, oleh Hendarman Supandji, Jaksa Agung Republik Indonesia.